

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variable yang akan diteliti.

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Mahmudi (2016:251) Sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut :

“Proses pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Adapun Menurut Mulyadi (2016:129)

Sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut :

“Merupakan hal yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Sedangkan Menurut V Wiratna Sujaweni (2015:69) Sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut :

“Suatu system yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan, adapun untuk tujuannya, menjaga kekayaan organisasi, menjaga keakuratan laporan keuangan, dan menjaga kedisiplinan dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Dari ketiga pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian internal adalah Suatu system untuk memberi jaminan keamanan yang ada dalam suatu perusahaan yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.1.2 Indikator Sistem Pengendalian internal Pemerintah

Menurut Nuramalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016:181) menguraikan karakteristik sistem pengendalian pemerintah sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat melalui :

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika.
- 2) Komitmen terhadap kompetensi.
- 3) Kepemimpinan yang kondusif
- 4) Pembentukan Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- 6) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- 7) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Untuk tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Penaksiran risiko mencakup:

- 1) Identifikasi Resiko. Mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.
- 2) Analisis Rediko. Menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian antara lain:

- 1) Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
- 2) Pembinaan sumber daya manusia.
- 3) Pengendalian atas pengelolaan system informasi.
- 4) Penetapan review atas indicator dan ukuran kerja.

- 5) Pemisahan fungsi.
- 6) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
- 7) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- 8) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- 9) Dokumentasi yang baik atas system pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi yang disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

e. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat ditindaklanjuti.

Sedangkan menurut Mahmudi (2016:245) menguraikan karakteristik sistem pengendalian pemerintah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian, pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat melalui :
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika.
 - b. Komitmen terhadap kompetensi.

- c. Kepemimpinan yang kondusif, adanya komunikasi yang baik antara pimpinan dan pegawai.
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai.
 - e. Pendelegasian tugas dan wewenang.
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM.
 - g. Perwujudan peran aparat pengawas intern yang efektif.
2. Penilaian risiko, pengendalian internal harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi. Penilaian risiko terdiri atas:
- a. Identifikasi risiko.
 - b. Analisis risiko.
3. Kegiatan pengendalian adalah membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi terhadap anggota dilaksanakan, kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi, yang mencakup:
- a. Review atas kerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
 - b. Pembinaan SDM.
 - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
 - d. Pengendalian fisik atas aset.
 - e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja.
 - f. Pemisahan fungsi
 - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
 - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
 - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
 - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan.

k. Dokumentasi yang baik atas system pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

4. Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi yang disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat ditindaklanjuti.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan indicator system pengendalian internal pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

2.1.2 Sistem Pelaporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pelaporan Keuangan

Menurut Moh. Mahsum dkk (2016:31) Pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Pelaporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan”.

Sedangkan Menurut Azhar Susanto (2013:22) Sistem adalah sebagai berikut:

”Kumpulan/group dari sub-sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”.

Adapun Menurut Kasmir (2012:7) menerangkan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

”laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam satu periode tertentu”.

Dari ketiga pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pelaporan Keuangan adalah kumpulan dari sub system atau komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan untuk mencapai satu tujuan tertentu untuk menunjukkan kondisi keuangan pada saat ini atau dalam satu periode tertentu.

2.1.2.2 Indikator Sistem Pelaporan Keuangan

Menurut Moh. Mahsum (2015:31) indikator Sistem Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparasi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan Menurut Erlina Rasdianto (2013:21) Sistem Pelaporan

Keuangan adalah :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparasi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil indikator untuk sistem pelaporan keuangan adalah akuntabilitas,managemen,transparasi, dan keseimbangan antar generasi (Moh. Mahsun, 2015:31 dan Erlina Rasdianto, 2013:21).

2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Halim (2012:20) akuntabilitas adalah sebagai berikut :

“Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang , badan hukum atau pimpinan organisasi

kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan”.

Sedangkan Menurut Siswanto (dalam Muhammad Sandy, 2015:11) kinerja adalah sebagai berikut:”Persentasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya”.

Adapun Menurut Mahmudi (2010:28) yang mengutip dari Hopwood dan Tomkins, 1984;Elwood, 1993 akuntabilitas kinerja adalah Sebagai berikut : “Pertanggungjawaban lembaga public untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien”.

Dari ketiga pengertian tersebut diatas, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien, serta persentasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

2.1.3.2 Indikator Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:122) Indikator dari Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut

1. Efisiensi

Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.

2. Efektivitas

Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan output

3. Outcome

Dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat atau kualitas output terhadap dampak yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil indikator untuk Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah Efisiensi, Efektivitas dan outcome (Mardiasmo, 2009:122).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menurut Rahmadi Murwanto (2012:195) adalah sebagai berikut:

“Pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengendalian intern terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja. Pengendalian intern juga berperanan sebagai perlindungan di garis depan dalam menjaga aset/harta dan mencegah dan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan. Pengendalian intern membantu manajemen instansi pemerintah dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik yang efektif”.

Menurut Risma Aprianti (2017) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Dina Afrina (2015) berdasarkan hasil penelitiannya dengan judul Pengaruh penerapan system akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan system pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Studi persepsian pada satuan kerja perangkat daerah Kota Pekanbaru) menemukan hasil bahwa penerapan system akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan system pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kota Pekanbaru.

Sedangkan menurut Agnestasia Laura Lumeta dkk (2016) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa system pengendalian intern secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah.

Berdasarkan dari teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terdapat pengaruh yang signifikan, pengendalian intern membantu manajemen instansi pemerintah dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik yang efektif.

2.2.2 Pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menurut Deddi (2011:41) adalah sebagai berikut :

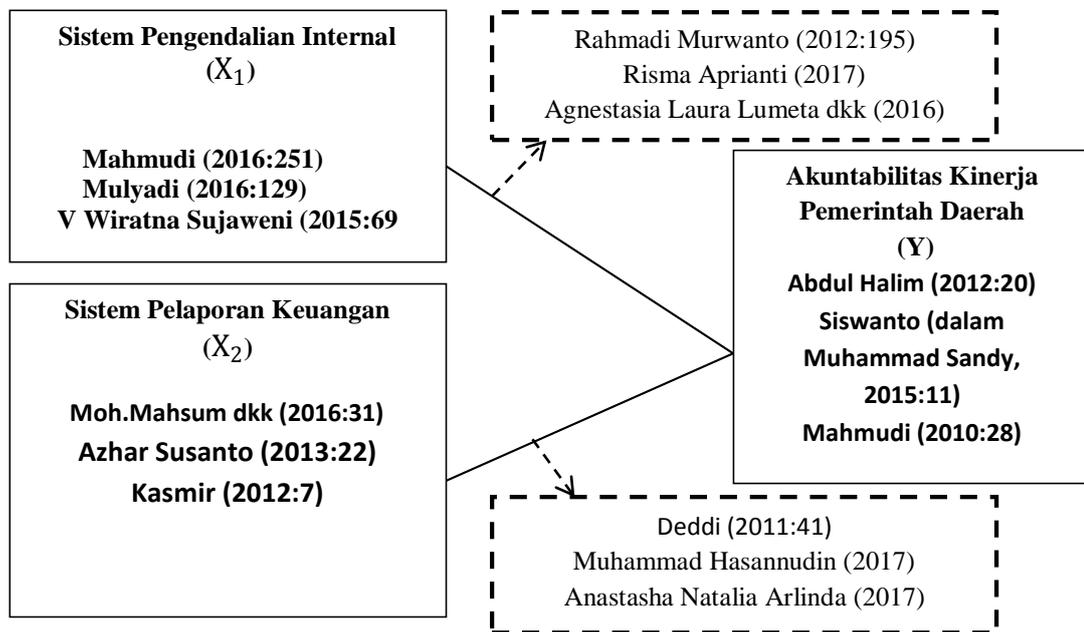
“Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. (LAN dan BPKP) Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas bagi keputusan ekonomi, sosial maupun politik”.

Menurut Muhammad Hasannudin (2017) Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana jika semakin baik Sistem Pelaporan Keuangan, maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan begitu pun jika sebaliknya. terkait dengan Sistem Pelaporan yaitu masih terbatasnya pegawai yang berlatar belakang akuntansi dalam hal pencatatan laporan arus kas pada pendapatan masih secara semi manual terkadang masih ada kesalahan atau kekeliruan dalam hal pencatatannya.

Menurut Anastasha Natalia Arlinda (2017) Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana semakin baik diterapkannya Sistem Pelaporan Keuangan maka tentu akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena lemahnya pembinaan pegawai dalam melakukan pelaporan keuangan dan masih adanya pegawai yang tidak menjunjung tinggi integritas dan etika

Berdasarkan dari teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana jika semakin baik Sistem Pelaporan Keuangan, maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan begitu pun jika sebaliknya.

Berdasarkan Uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikiran dalam bentuk skema paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2. 1Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

H2 : Sistem Pelaporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.